

Analisis Pengaruh Pengangguran, Penanaman Modal dalam Negeri, dan Upah Minimum Provinsi terhadap Kemiskinan di Jawa Timur

Thalita Luqiana Putri

e-mail: thalita.20062@mhs.unesa.ac.id

Ruth Eviana Hutabarat

e-mail: ruthhutabarat@unesa.ac.id

(Program Studi S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya)

ABSTRAK: Kemiskinan merupakan permasalahan serius yang perlu ditangani karena dapat menyulitkan masyarakat dalam mencukupi keperluan dasar serta standar hidup rata-rata. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh pengangguran, PMDN, dan UMP terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang didapat dari BPS dan NSWi pada tahun 2001 sampai tahun 2022 di wilayah Jawa Timur. Teknik analisis yang dipergunakan pada penelitian ini yakni analisis regresi linear berganda dengan menggunakan alat pengolah data EViews 12. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengangguran memberikan pengaruh positif serta signifikan pada kemiskinan di Jawa Timur. Sedangkan PMDN dan UMP memberikan pengaruh negatif serta signifikan pada kemiskinan di Jawa Timur. Pengangguran, PMDN, serta UMP secara bersamaan memberikan pengaruh signifikan pada kemiskinan di Jawa Timur. Penurunan kemiskinan dapat dicapai melalui program pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja, serta dengan melakukan penetapan UMP yang memadai selaras dengan Kebutuhan Hidup Layak.

Kata kunci – Kemiskinan, Pengangguran, Penanaman Modal Dalam Negeri, Upah Minimum Provinsi

ABSTRACT: Poverty is a serious problem that needs to be addressed because it can make it difficult for people to meet basic needs and an average standard of living. This research aims to determine the effect of unemployment, PMDN, and UMP on poverty in East Java. The data used in this research is secondary data obtained from BPS and NSWi from 2001 to 2022 in the East Java region. The analysis technique used in this research is multiple linear regression analysis using the data processing tool EViews 12. The results of this research show that unemployment has a positive and significant influence on poverty in East Java. Meanwhile, PMDN and UMP have a negative and significant influence on poverty in East Java. Unemployment, PMDN, and UMP together have a significant influence on poverty in East Java. Poverty reduction can be achieved through training and education programs that are in line with job market demands, as well as by determining an adequate UMP in line with Decent Living Needs.

Keywords – Poverty, Unemployment, Domestic Investment, Provincial Minimum Wage

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi permasalahan serius yang perlu diperhatikan dan ditangani dalam suatu daerah, karena dapat menyulitkan masyarakat guna mencukupi keperluan dasar serta standar hidup rata-rata. Kemiskinan mengacu pada ketidakmampuan suatu masyarakat untuk mencapai standar hidup minimum (Kuncoro, 2010). Dalam teori lingkaran setan kemiskinan, merujuk pada siklus negatif di mana faktor-faktor seperti pengangguran, investasi, dan tingkat upah saling memperkuat dalam menciptakan atau memperburuk kemiskinan. Pengangguran yang

tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, dengan demikian menjadikan turun permintaan atas barang dan jasa yang pada gilirannya bisa menghambat investasi. Di sisi lain, investasi yang rendah dapat menyebabkan kurangnya penciptaan lapangan kerja baru yang memperburuk masalah pengangguran dan kemiskinan. Tingkat upah juga berperan dalam dinamika ini, karena tingkat upah yang rendah dapat menyebabkan ketidakcukupan penghasilan bagi pekerja, yang pada akhirnya dapat memperdalam ketidaksetaraan dan kemiskinan. Sebab itu, segala upaya pengentasan kemiskinan mesti bertujuan guna memutus lingkaran setan serta perangkat kemiskinan ini.

Setiap negara senantiasa mencari solusi dan menciptakan beberapa program guna mengatasi permasalahan kemiskinan, begitupun pada Indonesia. Setiap negara sadar bahwa keberhasilan suatu program kebijakan merupakan salah satu indikator pengentasan kemiskinan (Ardiansyah & Pramono, 2019). Pemerintah Indonesia telah menjadikan pengentasan dan pengurangan kemiskinan sebagai prioritas kebijakan utama, dengan menerapkan berbagai program dan kebijakan untuk mencapai tujuan ini. Hal ini sejalan dengan dedikasi untuk mencapai tujuan pertama “Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)” yaitu penghapusan kemiskinan (no poverty) dengan mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apa pun serta di mana pun. Beragam taktik telah digunakan dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Tujuan tersebut dicapai melalui pengalokasian dana secara langsung dan tidak langsung untuk merangsang modal usaha dalam kegiatan ekonomi produktif serta memberikan bantuan sosial. Selain itu, sarana dan prasarana disediakan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan kegiatan sosial ekonomi.

Provinsi Jawa Timur mempunyai jumlah penduduk miskin terbanyak diantara seluruh provinsi di Indonesia. Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur meningkat sekitar 55,22 ribu jiwa pada September 2022 dibandingkan Maret 2022. Jumlah ini setara dengan 10,16% dari total penduduknya. Menko PMK Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa Jawa Timur menjadi fokus utama pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting. Fenomena tersebut dikarenakan tingginya populasi di Jawa Timur (Novrizaldi, 2023). Keadaan ini secara tidak langsung menggambarkan masih adanya tantangan dalam mengatasi kemiskinan.

Berbagai faktor dapat mempengaruhi kemiskinan, salah satunya adalah pengangguran. Pengangguran mengacu pada individu dalam angkatan kerja yang dengan aktif melakukan pencarian pekerjaan akan tetapi belum dapat menemukan peluang kerja, atau yang sudah menyerah mencari pekerjaan karena dianggap kurang memiliki prospek kerja. Pengangguran bisa memberi efek buruk pada pendapatan individu, yang pada akhirnya bisa berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Sukirno, 2006). Pengangguran menjadi permasalahan multifaset yang berdampak pada perekonomian negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Permasalahan ini masih terus berlanjut dan menjadi tantangan besar untuk dipecahkan meski di era ekonomi digital saat ini. Jumlah angkatan kerja terus bertambah, namun pasar kerja tidak mampu mengimbangi pertumbuhan tersebut. Persaingan di kalangan pencari kerja untuk mendapatkan peran karyawan tetap di setiap organisasi semakin ketat (Bethmarth et al., 2020). Pengangguran juga dapat meningkat meskipun terdapat banyak pilihan pekerjaan karena faktor-faktor seperti rendahnya pengetahuan, kesenjangan antara keterampilan dasar dan keterampilan yang dibutuhkan, atau bahkan seleksi yang disengaja.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 mengalami kenaikan dan menjadi TPT tertinggi selama 2009 sampai 2022 sebesar 5,84% (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023). Keadaan tersebut dikarenakan adanya Covid-19 yang mengakibatkan banyak lapangan kerja yang harus tutup dan pekerja yang berhenti bekerja. Namun, pada tahun 2021 sampai 2022 TPT mengalami penurunan kembali. Apabila lapangan pekerjaan tidak dapat melakukan penyerapan semua angkatan kerja yang ada, dengan demikian akan meningkatkan

angka pengangguran (Machmud, 2016). Dengan meningkatnya angka pengangguran maka akan dapat meningkatkan kemiskinan secara signifikan (Ari Kristin Prasetyoningrum, 2018) dan (Guampe et al., 2022).

Disamping pengangguran, faktor lain yang memberikan pengaruh pada kemiskinan yakni Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Investasi terbentuk dari investasi publik serta investasi swasta. Investasi publik bisa dilakukan melewati satu diantara instrumen kebijakan yakni belanja investasi pemerintah, sementara itu investasi swasta bisa bermula dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Selain peran pemerintah, pihak swasta juga perlu berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui akumulasi modal swasta yang secara langsung membawa nilai investasi serta produksi yang tinggi (Rahardjo, 2006). Sebuah negara bisa melakukan pengembangan produksi jasa serta barang yang mengarah pada penciptaan lapangan kerja di wilayah tersebut melalui investasi. Penyerapan angkatan kerja oleh lapangan kerja dapat menambah pendapatan masyarakat. Dengan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan demikian masyarakat akan dapat melakukan akses sendiri sarana kesehatan dan pendidikan. Sebab itu, adanya peningkatan investasi dapat menurunkan kemiskinan (Wati, 2015) dan (S & Soegoto, 2022).

Realisasi PMDN Provinsi Jawa Timur tertinggi yaitu pada tahun 2022 sebesar 65355949,2 juta rupiah. Pada tahun 2022 Provinsi Jawa Timur yakni provinsi ketiga dengan realisasi PMDN paling tinggi dari provinsi-provinsi Indonesia lainnya. Jawa Timur melakukan penyerapan PMDN dengan kontribusi 11,8% dari total realisasi PMDN. PMDN Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 23,6% dengan mencapai 552,8 triliun rupiah, memberikan kontribusi 23,6% terhadap total investasi nasional yang berhasil direalisasikan (Annur, 2023). Meskipun realisasi PMDN Provinsi Jawa Timur tertinggi ketiga dari provinsi lainnya di Indonesia, hal tersebut belum juga bisa menurunkan jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Timur yang pada tahun 2022 paling banyak daripada provinsi Indonesia lainnya.

Strategi pemerintah guna menaikkan lapangan kerja, nilai tambah, investasi di sektor riil, dan industrialisasi melibatkan peningkatan investasi. Usaha terkait dilakukan dengan meningkatkan kemudahan pengajuan dan pelaksanaan sistem izin usaha elektronik yang terintegrasi seperti "Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)". Berdasarkan hasil kajian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masih terdapat sejumlah faktor yang menghambat penerbitan izin penyelenggaraan melalui OSS RBA, antara lain ketidakselarasan antara peraturan perizinan di tingkat pusat dan daerah (WartaPemeriksa, 2022). Pemerintah diharapkan bisa melakukan penanganan permasalahan ini, satu diantaranya dengan memperbaiki peraturan perizinan dan menyederhanakan proses perizinan penanaman modal agar lebih cepat dan sederhana. Selain itu, manfaat investasi para investor tentunya akan memberikan lapangan kerja baru guna masyarakat di Provinsi Jawa Timur.

Faktor yang memberikan pengaruh pada kemiskinan selanjutnya yakni Upah Minimum Provinsi (UMP). Upah minimum yakni tarif standar terendah yang dipergunakan oleh suatu entitas guna mendistribusikan upah kepada karyawan atau pekerja suatu entitas. Upah minimum merupakan upaya untuk meningkatkan status masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya masyarakat miskin (Kuswantoro & Permata Dewi, 2016). Tujuan kenaikan upah minimum guna memberikan penghidupan yang layak dan menaikkan konsumsi masyarakat. Peningkatan konsumsi masyarakat akan memberikan dorongan timbulnya jenis-jenis usaha baru. Apabila hal ini berdampak pada pengurangan pengangguran dan kemiskinan, maka akan berdampak pada perekonomian secara keseluruhan (Islami & Anis, 2019). Dengan menaikkan UMP dengan demikian akan bisa menurunkan kemiskinan (Pasaribu, 2023). UMP di Provinsi Jawa Timur condong terjadi peningkatan sejak tahun 2001 sampai 2022. Meskipun meningkat, UMP tidak juga bisa menurunkan jumlah penduduk miskin Jawa Timur. Perihal ini diakibatkan terdapat kenaikan

biaya Kebutuhan Hidup Layak (KHL), sehingga pemerintah merasa perlu untuk menaikkan upah untuk menjamin tersedianya tenaga kerja yang baik di sektor tersebut (Hanifah & Hanifa, 2021).

Dengan berbagai permasalahan yang telah diuraikan, secara langsung akan berdampak pada kemiskinan di wilayah Jawa Timur. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran, PMDN, dan UMP terhadap kemiskinan di Jawa Timur, dengan demikian penulis mempunyai ketertarikan guna mengangkat judul “Analisis Pengaruh Pengangguran, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Upah Minimum Provinsi terhadap Kemiskinan di Jawa Timur”.

TINJAUAN PUSTAKA

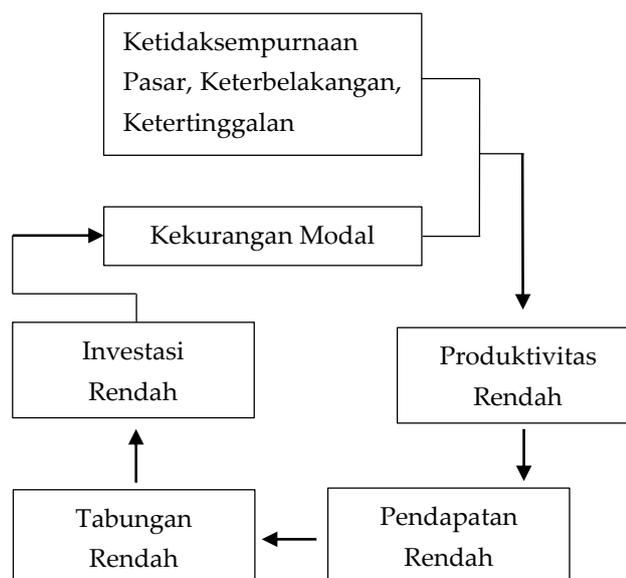
Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai keadaan tidak mampu mencapai tingkat kondisi kehidupan dasar. Kemiskinan bisa dilakukan pengamatan dari dua sudut pandang: pertama, kemiskinan absolut, yang menentukan jumlah individu yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. Kedua, kemiskinan relatif, khususnya proporsi pendapatan nasional yang dialokasikan untuk setiap kategori pendapatan. Untuk memperjelasnya, kemiskinan relatif sangat terkait dengan permasalahan distribusi pendapatan (Kuncoro, 2010).

Dalam mengukur kemiskinan, BPS memakai pendekatan kebutuhan dasar yang mengacu pada “Handbook on Poverty and Inequality” yang diterbitkan oleh Worldbank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dianggap sebagai ketidakmampuan secara ekonomi guna mencukupi kebutuhan pokok pangan dan bukan pangan yang diukur oleh pengeluaran. Penduduk tergolong miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita bulanannya berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan tersebut merupakan penjumlahan dari “Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM)”. GKM mewakili jumlah uang yang diperlukan guna mencukupi kebutuhan pangan minimum, sesuai dengan asupan harian sebesar 2.100 kilokalori per orang. Sedangkan GKNM mengarah pada jumlah uang yang dibelanjakan guna barang-barang penting non-makanan layaknya sandang, perumahan, kesehatan, serta pendidikan (Badan Pusat Statistik, 2023a).

Pada Maret 2022, tercatat garis kemiskinan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp460.909 per kapita per bulan yang terdiri dari GKM sebesar Rp348.399 (75,59%) dan GKNM sebesar Rp112.510 (24,41%). Sedangkan, rata-rata rumah tangga miskin Provinsi Jawa Timur memiliki 4,34 orang anggota rumah tangga. Rata-rata garis kemiskinan per rumah tangga miskin sebesar Rp2.000.345 per rumah tangga miskin per bulan (Jatim Newsroom, 2022).

Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan ini mengarah pada konsep dari teori lingkaran setan kemiskinan (Vicious Circle of Poverty). Ragnar Nurkse, seorang ekonom pembangunan terkenal pernah berkata bahwa: “a poor country is poor because it is poor (negara miskin menjadi miskin karena memang atau sudah miskin dari awal)” (Kuncoro, 2010).



Gambar 1. Lingkaran Setan Kemiskinan

Sumber: Ragnar Nurkse dalam Kuncoro 2010

Pengangguran

Menurut Sukirno (2016a), pengangguran mengacu pada seseorang yang merupakan bagian dari angkatan kerja serta secara aktif melakukan pencarian pekerjaan pada tingkat gaji terkhusus, namun tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang diharapkan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) biasanya didefinisikan sebagai jumlah angkatan kerja yang saat ini tidak bekerja serta sedang melakukan pencarian pekerjaan. Angka ini digunakan untuk mengetahui jumlah kesempatan kerja yang tidak dapat diakomodasi oleh pasar tenaga kerja di suatu wilayah tertentu.

Menurut BPS, TPT yakni persentase jumlah penduduk yang menganggur dibandingkan dengan seluruh angkatan kerja. Angkatan kerja mengacu pada penduduk yang berada pada usia kerja (>15 tahun) yang bekerja, menganggur, atau menganggur sementara. Pengangguran terbuka terdiri dari “penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan namun sedang aktif mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan pekerjaan atau usaha baru, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan karena mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja” (Badan Pusat Statistik, 2023b).

Pada saat kekayaan seseorang turun akibat pengangguran, kemungkinan besar seseorang tersebut akan terperosok dalam kemiskinan sebab tidak mempunyai peningkatan pendapatan. Pendapatan yang rendah akan menurunkan kemakmuran dan kesejahteraan penduduk, serta akan membuat bertambahnya kemiskinan di daerah tersebut (Sukirno, 2016a).

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Menurut Sukirno (2016b), pendefinisian investasi mengacu pada pengeluaran biaya guna memperoleh barang modal serta peralatan produksi dengan sasaran guna menggantikan dan memperluas barang modal yang ada dalam perekonomian. Investasi ini dimaksudkan untuk digunakan dalam penciptaan produk dan layanan di masa depan. Sederhananya, dalam teori ekonomi, investasi mengacu pada tindakan pembelanjaan dengan tujuan meningkatkan kemampuan perekonomian dalam menyediakan barang dan jasa. Investasi biasanya melibatkan penambahan produk dan layanan kepada masyarakat, seperti perolehan mesin baru, pembangunan jalan baru, pengembangan lahan tambahan, dan pendirian usaha baru. Investasi tidak hanya mempunyai tujuan untuk memaksimalkan produksi, tetapi juga mempengaruhi

alokasi tenaga kerja, pendapatan, laju ekspansi ekonomi, kualitas penduduk, serta kemajuan teknologi.

Sesuai UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007, “penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri” (Kemenkeu RI, 2007). Menurut undang-undang tersebut, salah satu tujuan penanaman modal baik dalam maupun luar negeri tidak hanya guna menaikkan laju pertumbuhan ekonomi nasional, namun juga untuk mencapai keseimbangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan yang disebut dengan upaya pembangunan ekonomi (Kambono & Marpaung, 2020).

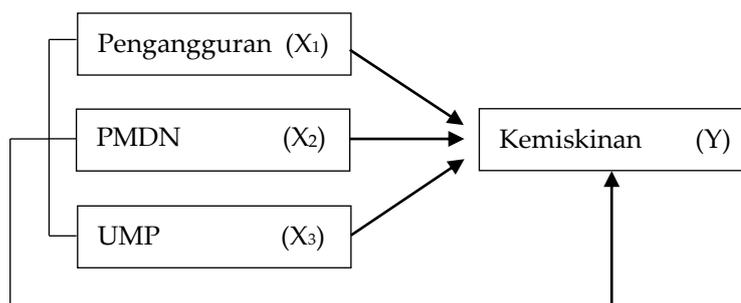
Berlandaskan teori Harrod-Domar, pertumbuhan ekonomi bergantung pada besarnya tingkat tabungan dan investasi. Oleh karena itu, jika terjadi peningkatan tabungan dan investasi, dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi masyarakat secara keseluruhan juga akan mengalami tren yang meningkat. Masuknya modal untuk investasi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang sejahtera dan penurunan angka kemiskinan (Rachmat, 2022).

PMDN mempunyai dampak besar terhadap kemiskinan. Dengan adanya realisasi PMDN akan dapat menekan atau menurunkan angka kemiskinan (Pratama et al., 2022). Fluktuasi PMDN dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan menjadi indikator efektivitas proses pembangunan, sejalan dengan tujuan pengentasan kemiskinan. Peningkatan investasi dalam negeri diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan (Elilia, 2021).

Upah Minimum Provinsi (UMP)

Pada teori ekonomi, upah digambarkan sebagai imbalan atas layanan fisik dan mental yang diberikan pekerja kepada pengusaha (Sukirno, 2016b). Sedangkan, “upah minimum provinsi merupakan upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di satu provinsi” (Kepmenakertrans, 2000). Tujuan penerapan kebijakan upah minimum adalah untuk menciptakan jaring pengaman bagi pekerja agar tidak tereksploitasi dan menerima upah sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Upah minimum merupakan upaya untuk meningkatkan status masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya pekerja yang berada dalam kondisi kurang beruntung atau miskin. Ketika upah minimum meningkat maka pendapatan yang diperoleh masyarakat akan meningkat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna keluar dari kemiskinan (Kaufman dan Hotchkiss, 1999 dalam Khabhibi, 2013).

Kerangka Berpikir



Gambar 2. Kerangka Berpikir

Hipotesis

Berdasarkan uraian-uraian dari konsep yang sudah dipaparkan, dengan demikian hipotesis penelitian ini: “Diduga pengangguran, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Timur”.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang melibatkan analisis data kuantitatif atau statistik untuk mendeskripsikan atau menjelaskan pengaruh variabel-variabel yang diteliti melalui pengujian hipotesis yang telah ditentukan (Sugiyono, 2018). Penelitian ini memakai data sekunder yang bersumber dari "Badan Pusat Statistik (BPS) dan National Single Window for Investment (NSWi)". Pengambilan sampel yang dipergunakan pada penelitian ini yakni teknik total sampling atau sampling jenuh yang merupakan teknik pengambilan sampel yang seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah "jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka (TPT), realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2001 sampai 2022", masing-masing sebanyak 22 sampel yang diambil dari data tahunan yang berupa data time series dengan data yang berdistribusi normal. Dengan kemiskinan (Y) sebagai variabel dependen, serta pengangguran (X_1), PMDN (X_2), dan UMP (X_3) sebagai variabel independen. Teknik analisis yang digunakan yakni analisis regresi linear berganda dengan alat pengolah data yang digunakan adalah EViews 12. Pengujian yang akan dilakukan yaitu uji asumsi klasik yang meliputi "uji multikolinearitas, uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas". Serta pengujian hipotesis yang meliputi "uji parsial (t-Statistik), uji simultan (F-Statistik), dan uji koefisien determinasi (R Square)".

PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Pada uji asumsi klasik dilakukan uji multikolinearitas, uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Berlandaskan pengujian yang telah dilakukan diketahui nilai VIF $\ln X_1$ 1,177129; $\ln X_2$ 9,269857; dan $\ln X_3$ 8,852435 dimana nilai VIF variabel independen < 10 yang berarti lolos uji multikolinearitas. Hasil uji normalitas diketahui bahwa nilai Jarque-Bera (JB) sebesar 0,252141 dengan probability sebesar 0,881553 dimana $> 0,05$ yang berarti data terdistribusi secara normal atau lolos uji normalitas. Hasil uji autokorelasi diketahui bahwa nilai probability Obs*R-Squared sebesar 0,6351 dimana $> 0,05$ yang berarti data lolos uji autokorelasi. Sedangkan hasil uji heteroskedastisitas diketahui bahwa nilai probability Obs*R-Squared sebesar 0,5488 dimana $> 0,05$ yang berarti data lolos uji heteroskedastisitas. Jadi dapat dilakukan penarikan kesimpulan bahwa penelitian ini lolos uji asumsi klasik.

2. Pengujian Hipotesis

a. Uji Parsial (t-Statistik)

- a) Variabel pengangguran (X_1) mempunyai nilai probability ($0,0000 < 0,05$) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6,451242 > 1,734$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga pengangguran memberikan pengaruh positif serta signifikan pada kemiskinan (Y) di Jawa Timur.
- b) Variabel PMDN (X_2) mempunyai nilai probability ($0,0001 < 0,05$) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($-5,268008 > 1,734$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga PMDN memberikan pengaruh negatif serta signifikan pada kemiskinan (Y) di Jawa Timur.
- c) Variabel UMP (X_3) mempunyai nilai probability ($0,0000 < 0,05$) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($-6,303736 > 1,734$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga UMP memberikan pengaruh negatif serta signifikan pada kemiskinan (Y) di Jawa Timur.

b. Uji Simultan (F-Statistik)

Berlandaskan hasil uji F-Statistik diketahui bahwa nilai probability F-statistic adalah $0,000000 < 0,05$, ini menunjukkan bahwa pengangguran, PMDN, dan UMP secara simultan atau bersamaan memberikan pengaruh signifikan pada kemiskinan di Jawa Timur.

c. Koefisien Determinasi (R Square)

Berlandaskan hasil pengujian diketahui bahwa koefisien determinasi atau R^2 sebesar 0,987213 yang mempunyai arti bahwa variabel independen secara bersamaan dapat menjelaskan mengenai variabel dependen sebesar 98,7213%. Adapun 1,2787% lagi dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model atau dijelaskan dalam term of error (e).

Pembahasan

Berlandaskan hasil regresi linear berganda dengan demikian diperoleh model persamaan yakni:

$$\text{Ln}Y = 11,37121 + 0,188741\text{Ln}X_1 - 0,054944\text{Ln}X_2 - 0,160950\text{Ln}X_3 + e$$

1. Pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Timur

Berlandaskan hasil penelitian, pengangguran memberikan pengaruh positif serta signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Dimana nilai koefisien regresi pengangguran sebesar 0,188741 yang mempunyai arti setiap jumlah pengangguran naik sebesar 1 persen dengan demikian akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0,188741 ribu jiwa. Hubungan positif tersebut dapat terjadi dikarenakan ketika seseorang menganggur membuatnya tidak mempunyai pendapatan, sedangkan kebutuhan akan terus ada serta semakin tinggi dan beragam. Jika seseorang tidak bekerja maka kebutuhannya tidak akan terpenuhi dengan baik dan jika kebutuhannya tidak terpenuhi dengan baik maka akibatnya adalah kemiskinan dan akhirnya kemiskinan akan semakin mengalami peningkatan.

Perihal tersebut selaras dengan pendapat Sukirno (2016a) yang menjelaskan bahwa pada saat kekayaan seseorang turun akibat pengangguran, kemungkinan besar seseorang tersebut akan terperosok dalam kemiskinan sebab tidak mempunyai peningkatan pendapatan. Pendapatan yang rendah akan menurunkan kemakmuran dan kesejahteraan penduduk, serta akan membuat bertambahnya kemiskinan di daerah tersebut. Penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Ari Kristin Prasetyoningrum dan U. Sulia Sukmawati (2018) serta Feliks Arfid Guampe, Abdi Sakti Walenta, dan Fredrik Bastian Kawani (2022) yang menunjukkan bahwa variabel pengangguran memberikan pengaruh positif serta signifikan pada kemiskinan.

2. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap kemiskinan di Jawa Timur

Berlandaskan hasil penelitian, PMDN memberikan pengaruh negatif serta signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Dimana nilai koefisien regresi PMDN sebesar $-0,054944$ yang mempunyai arti setiap PMDN bertambah sebesar 1 juta rupiah dengan demikian akan menurunkan kemiskinan sebesar 0,054944 ribu jiwa. Hubungan negatif tersebut terjadi dikarenakan PMDN dapat meningkatkan produksi yang akan memberikan dampak pada terbukanya lapangan kerja baru serta melakukan penyerapan banyak tenaga kerja. Sejumlah proyek baru akan meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat dan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan memberikan dampak pada penurunan tingkat kemiskinan.

Pernyataan ini sejalan dengan teori Harrod-Domar, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada tingginya tingkat tabungan dan investasi. Oleh karena itu, peningkatan tabungan dan investasi akan memberikan dampak pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jika ada modal yang masuk untuk berinvestasi maka akan mengakibatkan keberhasilan pembangunan ekonomi dan terserapnya angka kemiskinan (Rachmat, 2022). Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Suryatno Wiganepdo S. dan Herman Soegoto (2022) yang menunjukkan bahwa variabel PMDN memberikan pengaruh serta signifikan pada kemiskinan di Jawa Timur.

3. Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap kemiskinan di Jawa Timur

Berlandaskan hasil penelitian, UMP memberikan pengaruh negatif serta signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Dimana nilai koefisien regresi UMP sebesar $-0,160950$

yang mempunyai arti setiap UMP bertambah sebesar 1 rupiah dengan demikian akan menurunkan kemiskinan sebesar 0,160950 ribu jiwa. Hubungan negatif tersebut terjadi dikarenakan ketika UMP meningkat menjadikan pendapatan masyarakat bertambah yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat bisa keluar dari kemiskinan. Selain itu, dengan meningkatnya UMP juga dapat meningkatkan konsumsi masyarakat yang akhirnya muncul usaha baru yang dapat menyerap tenaga kerja serta menurunkan pengangguran yang nantinya juga akan berdampak pada pengurangan kemiskinan.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Kaufman dan Hotchkiss (1999) yang menjelaskan bahwa upah minimum merupakan upaya untuk meningkatkan status masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya pekerja yang berada dalam kondisi kurang beruntung atau miskin. Ketika upah minimum meningkat maka pendapatan yang diperoleh masyarakat akan mengalami peningkatan dengan demikian menaikkan kesejahteraan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan (Khabhibi, 2013). Penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Handika Permana dan Esti Pasaribu (2023) yang menunjukkan bahwa variabel UMP memberikan pengaruh negatif serta signifikan pada kemiskinan.

4. Pengaruh pengangguran, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap kemiskinan di Jawa Timur

Berlandaskan hasil penelitian, pengangguran, PMDN, dan UMP secara bersamaan memberikan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Dimana variabel independen secara bersamaan dapat memberi penjelasan mengenai variabel dependen sebesar 98,7213%. Nilai konstanta sebesar 11,37121 menunjukkan bahwa jika pengangguran, PMDN, dan UMP sama dengan 0 maka kemiskinan di Jawa Timur sebesar 11,37121 ribu jiwa.

Pengangguran dapat mempengaruhi pendapatan, sedangkan kebutuhan akan terus ada serta semakin tinggi dan beragam. Jika seseorang tidak bekerja maka kebutuhannya tidak akan terpenuhi dengan baik dan jika kebutuhannya tidak terpenuhi dengan baik maka akibatnya adalah kemiskinan dan akhirnya kemiskinan akan semakin meningkat. Pengangguran muncul ketika pasar tenaga kerja gagal mengintegrasikan angkatan kerja yang tersedia secara efektif. Pengangguran juga dapat muncul meskipun jumlah kesempatan kerja tinggi, hal ini mungkin diakibatkan oleh kurangnya informasi, kesenjangan antara keterampilan yang tersedia dengan yang diperlukan, atau bahkan pemilihan yang disengaja.

Sedangkan dengan adanya PMDN dapat meningkatkan produksi yang akan memberikan dampak pada terbukanya lapangan kerja baru serta melakukan penyerapan banyak tenaga kerja. Sejumlah proyek baru akan meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat dan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan memberi dampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Melalui peningkatan UMP juga dapat menjadikan pendapatan masyarakat bertambah yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat bisa keluar dari kemiskinan. Selain itu, dengan meningkatnya UMP juga dapat meningkatkan konsumsi masyarakat yang akhirnya muncul usaha baru yang dapat melakukan penyerapan tenaga kerja serta menurunkan pengangguran yang nantinya juga akan berdampak pada pengurangan kemiskinan.

Hal tersebut sesuai dengan teori lingkaran setan kemiskinan (Vicious Circle of Poverty), "adanya keterbelakangan, pasar yang tidak sempurna, ketertinggalan, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas, produktivitas yang rendah mengakibatkan penerimaan pendapatan yang rendah dan pendapatan yang rendah menyebabkan rendahnya tingkat tabungan dan investasi". Dan dengan demikian hal ini berlanjut dalam siklus yang tiada henti. Oleh karena itu, segala upaya untuk mengentaskan kemiskinan harus diarahkan untuk memutus lingkaran setan dan perangkat kemiskinan ini (Kuncoro, 2010).

KESIMPULAN

Berlandaskan hasil analisis serta pembahasan yang telah diuraikan, pengangguran memberikan pengaruh positif serta signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Sedangkan PMDN dan UMP memberikan pengaruh negatif serta signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Pengangguran, PMDN, dan UMP secara bersamaan memberikan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Dimana variabel independen secara bersamaan dapat menjelaskan mengenai variabel dependen sebesar 98,7213%. Penurunan kemiskinan dapat dilakukan melalui implementasi program pelatihan serta pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja untuk menaikkan keterampilan serta daya saing tenaga kerja lokal, sehingga dapat terlibat dalam industri-industri yang berkembang melalui investasi PMDN. Serta menetapkan UMP yang mencerminkan Kebutuhan Hidup Layak bagi pekerja di berbagai sektor dan wilayah, dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti biaya hidup, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Annur, C. M. (2023). *Jawa Barat, Provinsi Penerima Investasi Terbesar pada 2022*. Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/26/jawa-barat-provinsi-penerima-investasi-terbesar-pada-2022>
- Ardiansyah, M., & Pramono, D. S. (2019). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2017. *Jurnall Ilmiah*, 20.
- Ari Kristin Prasetyoningrum, U. S. S. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 217–240.
- Badan Pusat Statistik. (2023a). *Kemiskinan dan Ketimpangan*. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023b). *Tenaga Kerja*. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2023). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)*. Jatim.Bps.Go.Id. <https://jatim.bps.go.id/indicator/6/54/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-provinsi-jawa-timur.html>
- Bethmarth, A. V., Nafie, Subagiarta, I. W., & Prianto, F. W. (2020). Determinan Angka Pengangguran Di Jawa Timur Tahun 2007-2017. *Jiep*, 20(1), 21–30.
- Elilia, L. N. (2021). *Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2012-2019* [Institut Agama Islam Negeri Tulungagung]. <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/19780>
- Guampe, F. A., Walenta, A. S., & Kawani, F. B. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2001-2021. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 6(1), 92–102. <https://doi.org/10.29408/jpek.v6i1.5536>
- Hanifah, S., & Hanifa, N. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lamongan. *Independent: Journal of*

Economics, 1(3), 191–206. <https://doi.org/10.26740/independent.v1i3.43632>

Islami, N., & Anis, A. (2019). Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 939. <https://doi.org/10.24036/jkep.v1i3.7721>

Jatim Newsroom. (2022). *Maret 2022, Persentase Penduduk Miskin Jatim sebesar 10,38%*. [Jatimprov.Go.Id. https://jatimprov.go.id/berita/maret-2022-persentase-penduduk-miskin-jatim-sebesar-1038_Vadp5377nsPang](https://jatimprov.go.id/berita/maret-2022-persentase-penduduk-miskin-jatim-sebesar-1038_Vadp5377nsPang)

Kambono, H., & Marpaung, E. I. (2020). Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 12(1), 137–145. <https://doi.org/10.28932/jam.v12i1.2282>

Kemenkeu RI. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. JDIH Kemenkeu.

Kepmenakertrans. (2000). Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP-226/MEN/2000. *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi*, VII(8), 1–69. <https://indolabourdatabase.files.wordpress.com/2018/03/permenaker-no-8-tahun-2010-tentang-apd.pdf>

Khabhibi, A. (2013). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan*. Universitas Sebelas Maret.

Kuncoro, M. (2010). *Ekonomika Pembangunan*. Erlangga.

Kuswanto, K., & Permata Dewi, I. G. (2016). Analisis Tingkat Pendidikan, PDRB Dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(1), 18–35. <https://doi.org/10.35448/jequ.v6i1.4165>

Machmud, A. (2016). *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*. Erlangga.

Novrizaldi. (2023). *Meski Turun Tajam, Jatim Jadi Perhatian Utama Stunting dan Kemiskinan Ekstrem*. [Kemenkopmk.Go.Id. https://www.kemenkopmk.go.id/meski-turun-tajam-jatim-jadi-perhatian-utama-stunting-dan-kemiskinan-ekstrem](https://www.kemenkopmk.go.id/meski-turun-tajam-jatim-jadi-perhatian-utama-stunting-dan-kemiskinan-ekstrem)

Pasaribu, H. P. dan E. (2023). Pengaruh Inflasi, IPM, UMP dan PDRB terhadap Kemiskinan di Pulau Sumatera. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 7(3), 1113–1132.

Pratama, A. A., Lathifah, I. L., & Desmawan, D. (2022). Pengaruh Tingkat Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2011-2021. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 1(2), 179–188.

Rachmat, N. N. (2022). *Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Gowa* [Universitas Hasanuddin]. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/18911/3/A011171518_skripsi_07-09-2022_dp.pdf

Rahardjo, S. (2006). *Kiat Membangun Aset Kekayaan Panduan Investasi Saham dari A sampai Z*. Elex Media Komputindo.

S, S. W., & Soegoto, H. S. (2022). Peran PMDN dan PMA terhadap Penurunan Angka Kemiskinan

di Indonesia. *JURISMA: Jurnal Riset Bisnis & Manajemen*, 12(1), 1–15.
<https://doi.org/10.34010/jurisma.v12i1.5838>

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*. Alfabeta.

Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Kencana Prenadamedia Group.

Sukirno, S. (2016a). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Rajawali Pers.

Sukirno, S. (2016b). *Mikroekonomi Teori Pengantar*. Rajawali Pers.

WartaPemeriksa. (2022). *Ketidaksielarasan Peraturan Hambat Penerbitan Izin Berusaha OSS*. Wartapemeriksa.Bpk.Go.Id. <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=37426>

Wati, H. W. (2015). Analisis Pengaruh Belanja Modal Daerah, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2013 (Studi Kasus pada 33 Provinsi). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, Vol 3.